

ANALISIS APBN

BAB I

PENDAHULUAN

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ditetapkan dengan undang-undang. Tahun anggaran APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBN terdiri atas:

- ◆ Anggaran pendapatan, yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah
- ◆ Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- ◆ Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBN mempunyai beberapa fungsi seperti fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

Proses disahkannya APBN itu, secara sederhana dimulai dengan diajukannya rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) oleh pemerintah kepada

DPR, apabila DPR menyetujui rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah itu, maka DPR mensahkannya menjadi APBN, tetapi apabila DPR tidak menyetujuinya maka pemerintah menggunakan APBN tahun yang lalu.

APBN tahun 2004 merupakan APBN kelima atau terakhir sebagai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 dan merupakan yang ketiga dibawah Kabinet Gotong Royong. Selain mengacu kepada GBHN 1999-2004, penyusunan APBN 2004 juga mengacu kepada Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Sesuai dengan arah kebijakan di bidang ekonomi dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, kebijakan fiskal diarahkan untuk menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.

APBN tahun 2005 sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi tahun 2004. Dipengaruhi juga oleh lingkungan eksternal dan kebijakan ekonomi makro tahun 2005. Undang-undang APBN tahun 2005 disusun dalam masa peralihan kekuasaan dari pemerintahan kabinet gotong royong ke pemerintahan kabinet Indonesia bersatu.

APBN tahun 2006 merupakan satu bagian dari kebijakan ekonomi jangka menengah tahun 2004 - 2009 yang mengarah kepada tiga strategi dasar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, yaitu pro-growth, pro-employment, dan pro-poor Undang-undang Nomor 13 tahun 2005 tentang APBN Tahun 2006 didasarkan pada asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi 6,2 persen, tingkat inflasi 8,0 persen (y-o-y), rata-rata nilai tukar rupiah Rp9.900 per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan 9,5 persen, rata-rata harga minyak mentah US\$57 per barel, dan rata-rata volume lifting 1,05 juta barel per hari.

Sejak ditetapkannya undang-undang tersebut, telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan yang cukup berarti, baik yang bersumber dari perubahan faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pokok-pokok kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dan pelaksanaan APBN 2006. Berdasarkan perubahan dan perkembangan yang terjadi tersebut, Pemerintah mengajukan perubahan atas Undang-

undang APBN 2006 yang disebut APBN-P 2006 dengan tujuan agar keberlangsungan kebijakan fiskal dapat terjaga dan sasaran pembangunan ekonomi 2006 bisa tercapai.

Terlepas dari semua itu, keadaan ekonomi Indonesia dalam tiga tahun terakhir pada gilirannya akan mempengaruhi besaran APBN baik 2004, 2005, maupun 2006. Beberapa indikator ekonomi makro utama yang sangat mempengaruhi tercapainya sasaran-sasaran dalam APBN baik 2004, 2005, maupun 2006, diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia, dan tingkat produksi minyak Indonesia.

BAB II
TABEL APBN

Tabel 1a APBN 2004 dan APBN-P 2004 (miliar rupiah)				
Keterangan	APBN	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pendapatan Negara dan Hibah	349.933,7	17,5	403.769,6	20,3
I. Penerimaan Dalam Negeri	349.299,5	17,5	403.031,8	20,3
1. Penerimaan Perpajakan	272.175,1	13,6	279.207,5	14,0
a. Pajak Dalam Negeri	260.223,9	13,0	267.033,4	13,4
i. Pajak penghasilan	133.967,6	6,7	135.653,0	6,8
1. Migas	13.132,6	0,7	23.083,8	1,2
2. Non-Migas	120.835,0	6,0	112.767,2	5,7
ii. Pajak pertambahan nilai	86.272,7	4,3	87.506,3	4,4
iii. Pajak bumi dan bangunan	8.030,7	0,4	10.211,7	0,5
iv. BPHTB	2.667,9	0,1	3.182,2	0,2
v. Cukai	27.671,0	1,4	28.441,9	1,4
vi. Pajak lainnya	1.614,0	0,1	1.838,3	0,1
b. Pajak Perdagangan Internasional	11.951,2	0,6	12.174,1	0,6
i. Bea masuk	11.636,0	0,6	11.837,6	0,6
ii. Pajak/pungutan ekspor	315,2	0,0	336,5	0,0
2. Penerimaan Bukan Pajak	77.124,4	3,9	123.824,3	6,2
a. Penerimaan SDA	47.240,5	2,4	92.407,6	4,6
i. Migas	44.002,2	2,2	87.647,4	4,4
ii. Non Migas	3.238,3	0,2	4.760,2	0,2
b. Bagian Laba BUMN	11.454,2	0,6	9.103,5	0,5
c. PNBPL Lainnya	18.429,8	0,9	22.313,2	1,1
II. Hibah	634,2	0,0	737,7	0,0
B. Belanja Negara	374.351,3	18,7	430.041,2	21,6
I. Belanja Pemerintah Pusat	255.309,0	12,8	300.036,2	15,1
1. Pengeluaran Rutin	184.437,8	9,2	228.088,4	11,5
a. Belanja Pegawai	56.738,0	2,8	54.217,4	2,7
b. Belanja Barang	17.279,8	0,9	16.779,8	0,8
c. Pembayaran Bunga Utang	65.651,0	3,3	63.227,7	3,2
i. Utang Dalam Negeri	41.275,9	2,1	39.814,6	2,0
ii. Utang Luar Negeri	24.375,1	1,2	23.413,2	1,2
d. Subsidi	26.362,1	1,3	69.854,8	3,5
i. Subsidi BBM	14.527,1	0,7	59.179,0	3,0
ii. Subsidi non BBM	10.995,0	0,5	9.835,8	0,5
iii. Subsidi/Bantuan dlm rangka Penugasan (PSO)	840,0	0,0	840,0	0,0
e. Pengeluaran Rutin Lainnya	18.406,9	0,9	24.008,7	1,2
2. Pengeluaran Pembangunan	70.871,2	3,5	71.947,8	3,6
a. Pembiayaan pembangunan rupiah	50.500,0	2,5	52.708,8	2,6
b. Pembiayaan proyek	20.371,2	1,0	19.239,0	1,0
II. Belanja Daerah	119.042,3	6,0	130.005,0	6,5
1. Dana Perimbangan	112.186,9	5,6	123.149,6	6,2
a. Dana Bagi Hasil	26.927,9	1,3	37.368,4	1,9
b. Dana Alokasi Umum	82.130,9	4,1	82.130,9	4,1
c. Dana Alokasi Khusus	3.128,1	0,2	3.650,3	0,2
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	6.855,4	0,3	6.855,4	0,3
C. Keseimbangan Primer	41.233,5	2,1	36.956,1	1,9
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(24.417,5)	(1,2)	(26.271,6)	(1,3)
E. Pembiayaan	24.417,5	1,2	26.271,6	1,3
I. Pembiayaan Dalam Negeri	40.556,3	2,0	50.050,5	2,5
1. Perbankan dalam negeri	19.198,6	1,0	23.911,8	1,2
2. Non-perbankan dalam negeri	21.357,7	1,1	26.138,6	1,3
a. Privatisasi & Penjualan aset prog restrukt perbankan	10.000,0	0,3	17.913,3	0,3
b. Surat Utang Negara (neto)	11.357,7	0,6	8.225,3	0,4
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(16.138,7)	(0,8)	(23.778,9)	(1,2)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	28.237,0	1,4	21.745,6	1,1
a. Pinjaman Program	8.500,0	0,4	3.140,8	0,2
b. Pinjaman Proyek	19.737,0	1,0	18.604,8	0,9
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(44.375,7)	(2,2)	(45.524,5)	(2,3)

Tabel 1b
RAPBN 2005 dan APBN 2005
(miliar rupiah)

Keterangan	RAPBN	% thd PDB	APBN	% thd PDB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pendapatan Negara dan Hibah	377.886,3	17,2	380.377,1	17,4
I. Penerimaan Dalam Negeri	377.136,3	17,2	379.627,1	17,3
1. Penerimaan Perpajakan	297.510,0	13,6	297.844,1	13,6
a. Pajak Dalam Negeri	285.147,3	13,0	285.481,4	13,0
i. Pajak penghasilan	141.858,5	6,5	142.192,6	6,5
1. Migas	13.568,6	0,6	13.568,6	0,6
2. Non Migas	128.289,9	5,9	128.624,0	5,9
ii. Pajak pertambahan nilai	98.828,4	4,5	98.828,4	4,5
iii. Pajak bumi dan bangunan	10.272,2	0,5	10.272,2	0,5
iv. BPHTB	3.214,7	0,1	3.214,7	0,1
v. Cukai	28.933,6	1,3	28.933,6	1,3
vi. Pajak lainnya	2.039,9	0,1	2.039,9	0,1
b. Pajak Perdagangan Internasional	12.362,7	0,6	12.362,7	0,6
i. Bea masuk	12.017,9	0,5	12.017,9	0,5
ii. Pajak/pungutan ekspor	344,8	0,0	344,8	0,0
2. Penerimaan Bukan Pajak	79.626,3	3,6	81.783,0	3,7
a. Penerimaan SDA	50.941,4	2,3	50.941,4	2,3
i. Migas	47.121,1	2,2	47.121,1	2,2
ii. Non Migas	3.820,3	0,2	3.820,3	0,2
b. Bagian Laba BUMN	9.424,0	0,4	10.591,3	0,5
c. PNPB Lainnya	19.260,9	0,9	20.250,3	0,9
II. Hibah	750,0	0,0	750,0	0,0
B. Belanja Negara	394.778,5	18,0	397.769,3	18,2
I. Belanja Pemerintah Pusat	264.877,3	12,1	266.220,3	12,2
1. Belanja Pegawai	62.240,2	2,8	60.482,8	2,8
2. Belanja Barang	31.030,7	1,4	32.368,0	1,5
3. Belanja Modal	42.870,0	2,0	45.624,7	2,1
4. Pembayaran Bunga Utang	63.986,8	2,9	64.136,8	2,9
a. Utang Dalam Negeri	38.844,5	1,8	38.994,5	1,8
b. Utang Luar Negeri	25.142,4	1,1	25.142,4	1,1
5. Subsidi	33.645,2	1,5	31.295,7	1,4
a. Perusahaan Negara	33.603,0	1,5	31.221,8	1,4
i. Lembaga Keuangan	1.153,0	0,1	771,8	0,0
ii. Lembaga Non Keuangan	32.450,0	1,5	30.450,0	1,4
b. Perusahaan Swasta	42,2	0,0	73,9	0,0
6. Belanja Hibah	-	-	-	-
7. Bantuan Sosial	16.268,6	0,7	16.492,5	0,8
8. Belanja Lain-lain	14.835,8	0,7	15.819,8	0,7
II. Belanja Daerah	129.901,2	5,9	131.549,1	6,0
1. Dana Perimbangan	123.448,2	5,6	124.306,5	5,7
a. Dana Bagi Hasil	31.217,8	1,4	31.217,8	1,4
b. Dana Alokasi Umum	88.130,4	4,0	88.765,6	4,1
c. Dana Alokasi Khusus	4.100,0	0,2	4.323,1	0,2
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	6.453,0	0,3	7.242,6	0,3
a. Dana Otonomi Khusus	1.762,6	0,1	1.775,3	0,1
b. Dana Penyesuaian	4.690,4	0,2	5.467,3	0,2
C. Keseimbangan Primer	47.094,7	2,1	46.744,6	2,1
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(16.892,2)	(0,8)	(17.392,2)	(0,8)
E. Pembiayaan	16.892,2	0,8	17.392,2	0,8
I. Pembiayaan Dalam Negeri	37.085,8	1,7	37.585,8	1,7
1. Perbankan dalam negeri	9.000,0	0,4	9.000,0	0,4
2. Non-perbankan dalam negeri	28.085,8	1,3	28.585,8	1,3
a. Privatisasi & Penj aset prog restrukt perbankan	7.500,0	0,3	7.500,0	0,3
b. Surat Utang Negara (neto)	20.585,8	0,9	22.085,8	1,0
c. Penyertaan Modal Neg Secondary Mortgage Facility	-	-	(1.000,0)	(0,0)
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(20.193,6)	(0,9)	(20.193,6)	(0,9)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	26.642,9	1,2	26.642,9	1,2
a. Pinjaman Program	8.600,0	0,4	8.600,0	0,4
b. Pinjaman Proyek	18.042,9	0,8	18.042,9	0,8
2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN	(46.836,5)	(2,1)	(46.836,5)	(2,1)

BAB III

ANALISIS APBN TAHUN 2004, 2005, dan 2006

A. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah ini terbagi dua yaitu pendapatan dalam negeri dan hibah, sedangkan pendapatan dalam negeri dibagi menjadi penerimaan perpajakan dan bukan pajak. Perkembangan pendapatan negara dan hibah selama tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik dan sangat besar peranannya dalam mendukung proses kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.

Membbaiknya kinerja pendapatan negara dan hibah ini, tidak saja ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan secara nominal, akan tetapi juga ditunjukkan oleh komposisi pendapatan negara yang semakin didominasi oleh sektor perpajakan. Secara nominal, pendapatan negara dan hibah meningkat dari Rp336,2 triliun pada tahun 2003, menjadi Rp349,9 triliun pada APBN 2004, kemudian meningkat lagi menjadi Rp380 triliun pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 dianggarkan dalam APBN sebesar Rp625 triliun, tetapi baik tahun 2004 dan 2005 karena sesuatu dan lain hal, APBN selalu mengalami perubahan ditengah tahun anggaran.

APBN perubahan tahun 2004 sebesar 403,7 triliun, sedangkan APBN 2005 mengalami dua kali perubahan. Pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P I 2005 sebesar 491 triliun dan APBN-P II sebesar 540 triliun. Sementara itu rasionya terhadap PDB cenderung stagnan yaitu sekitar 20% baik tahun 2004, 2005, maupun 2006. peningkatan nilai nominal pendapatan negara dan hibah Ini didukung terutama oleh adanya peningkatan penerimaan pada sector perpajakan, sejalan dengan semakin membaiknya perkembangan perekonomian nasional yang menyebabkan berkembangnya penerimaan pajak secara perlahan-lahan. Di samping itu, faktor lain yang juga turut berpengaruh pada peningkatan penerimaan perpajakan adalah berbagai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, serta berbagai langkah kebijakan yang ditempuh dalam rangka perluasan basis pajak.

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan dalam struktur pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak atas perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Sementara itu, pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis penerimaan penyumbang terbesar pada sektor perpajakan yang perkembangannya senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam periode waktu 2001 sampai dengan 2003, secara nominal penerimaan PPh meningkat sebesar Rp26,3 triliun atau rata-rata 13,0 persen per tahun, yaitu dari Rp94,6 triliun dalam tahun 2001 menjadi Rp120,9 triliun dalam APBN 2003. Sedangkan untuk tahun 2004 sampai tahun 2006 juga mengalami peningkatan yang cukup pesat dari 135 triliun dalam APBN-P 2004 menjadi 210 triliun dalam APBN 2006. Tetapi berdasarkan rasio terhadap PDB selama tiga tahun terakhir rasionya sama yaitu 6,8 %. Penerimaan dari PPN dan PPnBM pun mengalami peningkatan yang cukup bagus secara nominal.

Beberapa faktor yang mendorong perkembangan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut antara lain adalah kebijakan yang diterapkan di bidang PPN dan PPnBM, serta perkembangan beberapa variabel ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang berpengaruh terhadap perkembangan transaksi ekonomi yang merupakan obyek PPN dan PPnBM. Beberapa kebijakan di bidang PPN dan PPnBM yang berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan PPN dan PPnBM dalam tiga tahun terakhir diantaranya meliputi ekstensifikasi, intensifikasi, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak diantaranya mencakup percepatan pengurusan restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan kebijakan ekstensifikasi selain dilaksanakan terhadap pengusaha kena pajak (PKP) terutama yang melakukan penyerahan barang kena pajak di pusat-pusat pasar/kegiatan konsumen, juga dilakukan melalui (i) pencabutan berbagai fasilitas PPN dan PPnBM dan (ii) penguasaan

PPN secara lebih efektif atas jasa kena pajak, khususnya jasa-jasa yang terkait dengan e-commerce.

Sementara itu, kebijakan intensifikasi antara lain dilaksanakan melalui (i) intensifikasi pemungutan PPN terhadap PKP di sektor-sektor usaha yang mengalami perkembangan seperti sector perdagangan, (ii) peningkatan kegiatan penagihan aktif terutama terhadap penunggak potensial, (iii) penghitungan kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, serta (iv) penelitian kembali atas wajib pajak yang memperoleh fasilitas pembayaran pendahuluan. Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam periode 2003 – 2005, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didukung oleh penerimaan SDA migas dan nonmigas, bagian Pemerintah atas laba BUMN, dan PNBP lainnya menunjukkan kecenderungan yang meningkat. dengan hanya 99 triliun yang terealisasi dalam tahun 2003 menjadi 180 triliun dalam APBN-P II tahun 2005, atau meningkat hampir dua kali lipat. Sementara itu dalam APBN tahun 2006 dianggarkan sebesar 205 triliun.

2. Hibah .

Seperti halnya dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, penerimaan negara dalam bentuk hibah yang dicatat dalam tahun 2004 sampai 2006 pada dasarnya merupakan sumbangan atau donasi (grant) dari negara atau lembaga internasional yang tidak perlu dibayar kembali. Dalam tahun 2004, realisasi penerimaan dalam bentuk hibah mencapai Rp0,7 triliun. Sedangkan dalam tahun 2005 penerimaan tersebut naik berlipat-lipat menjadi Rp7,4 triliun. Tingginya angka penerimaan hibah dalam APBN tersebut terkait dengan bantuan dari negara-negara donor dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Sumatera Utara yang terkena dampak bencana alam dan tsunami, yang menimpa wilayah tersebut pada akhir tahun 2004.

Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan *Consultative Group on Indonesia* (CGI), dalam pertemuan CGI pada tanggal 20 Januari 2005 di Jakarta, pemerintah Indonesia mendapatkan persetujuan tambahan hibah berupa *regular pledge* dan *tsunami pledge*. Khusus untuk *tsunami pledge* komitmen bantuan hibah yang akan diterima oleh Pemerintah Indonesia berasal dari IBRD/IDA, Islamic Development

Bank (IDB), dan Pemerintah Jepang. Selain itu, Pemerintah juga menerima komitmen hibah dari Bank Pembangunan Asia (ADB), dan juga negara-negara donor lainnya.

Sementara itu, dalam APBN tahun 2006, penerimaan hibah hanya dianggarkan 3,6 triliun.. Realisasi penerimaan hibah dalam APBN tahun 2006 diharapkan masih dapat meningkat sejalan dengan kesiapan administrasi dan kesediaan donor untuk mencairkan dana hibahnya pada semester II 2006.

B. Belanja Negara

Dari perkembangan beberapa tahun terakhir, anggaran belanja negara, khususnya belanja rutin dan pembangunan secara nominal cenderung meningkat dengan pesat. Hal ini tidak terlepas dari langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengantisipasi berbagai perkembangan di bidang ekonomi dan non ekonomi, di samping untuk mengimbangi dari semakin meningkatnya penerimaan negara secara nominal. Beban anggaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa kebijakan antara lain,

- ◆ *pertama*, program penyehatan dan restrukturisasi perbankan yang dilakukan pada masa krisis ekonomi, sehingga pemerintah harus menerbitkan surat utang dan obligasi yang mengakibatkan kepada timbulnya beban bunga utang dalam negeri yang cukup besar.yang terasa sampai beberapa tahun terakhir.
- ◆ *Kedua*, pemberian subsidi untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi dampak krisis ekonomi akibat masih rendahnya pendapatan riil masyarakat, misalnya pemberian bantuan langsung tunai (BLT).
- ◆ *Ketiga*, pemberian stimulus kepada pemulihan ekonomi melalui peningkatan anggaran belanja pembangunan pemerintah, akibat dari masih lemahnya peranan swasta dalam menggerakkan laju perekonomian sejak krisis ekonomi tahun 1997.
- ◆ *Keempat*, implikasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga melalui APBN, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran belanja untuk daerah dalam jumlah yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Secara nominal jumlah belanja negara dalam tiga tahun terakhir meningkat cukup pesat. Dalam APBN tahun 2004 jumlah belanja negara dianggarkan 374,3 triliun yang kemudian diubah dalam APBN-P 2004 menjadi 430 triliun. Kemudian dalam APBN tahun 2005 dianggarkan 397 triliun, tetapi kemudian mengalami dua kali perubahan dalam APBN-P I dan APBN-P II tahun 2005 sebesar 511,9 triliun dan 565 triliun, perubahan yang sangat besar ini terkait dengan beberapa hal misalnya karena adanya bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, yang memerlukan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang cukup besar. Sedangkan rasionya terhadap PDB, juga mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 18,2 % dalam APBN 2004, menjadi 21,3 % pada APBN tahun 2005, dan pada APBN 2006 rasionya adalah 22,1 %.

1. Belanja Pemerintah Pusat

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi di bidang fiskal, sebenarnya rasio anggaran belanja pemerintah pusat terhadap PDB sebelum tahun 2003 menunjukkan tren penurunan. Dalam tahun 2001 rasio anggaran belanja pemerintah pusat terhadap PDB mencapai 18,0 persen dan dalam tahun 2002 menjadi 14,2 persen. Demikian pula, dalam APBN tahun 2003 rasionya menurun menjadi 13,1 persen. Tetapi dalam APBN-P tahun 2004 rasionya naik kembali menjadi 15,1 %, padahal dalam APBN tahun 2004 hanya 12,8 %. Pada tahun 2005 rasionya meningkat menjadi 15,5 %, dan pada anggaran tahun 2006 turun kembali menjadi 15,1 % terhadap PDB.

Jumlah pengeluaran pemerintah pusat dalam APBN dan APBN-P tahun 2004 adalah 255,3 triliun dan 300 triliun. Untuk tahun 2005 dalam APBN, APBN-P I, dan APBN-P II adalah 266,2 triliun, 364,1 triliun dan 411,6 triliun. Sedangkan dalam APBN tahun 2006 dianggarkan 427,5 triliun. Secara nominal, anggaran belanja pemerintah pusat tersebut lebih banyak direalisasikan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai dan barang, pembayaran bunga utang, dan subsidi dan sisanya untuk pengeluaran pembangunan.

a. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin ini diantaranya belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, dan yang lainnya. Dalam APBN tahun 2004 dicantumkan

besarannya yaitu 184,4 triliun, sehingga dapat diketahui rasio terhadap PDBnya yaitu 11,5 %, tetapi pada APBN 2005 dan 2006 tidak dicantumkan besarannya, tetapi langsung menyebut pos-pos pengeluarannya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan fungsi dan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, seperti kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian.

Misi negara itu dapat direalisasikan dengan mengalokasikan anggaran pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. Meskipun demikian Perkembangan pengeluaran rutin tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai variabel ekonomi makro, diantaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, suku bunga SBI-3 bulan, harga dan tingkat produksi minyak mentah, laju inflasi, serta volume konsumsi BBM di dalam negeri.

Selain itu, besaran pengeluaran rutin juga dipengaruhi oleh berbagai langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan menjaga stabilitas perekonomian, seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang, dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran.

b. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan ini dalam APBN tahun 2004 terdiri dari pembiayaan pembangunan dalam mata uang rupiah dan juga yang kedua adalah pembiayaan proyek. Dalam APBN-P tahun 2004 nilai nominal pengeluaran pembangunan adalah 71,9 triliun dengan rasio terhadap PDB adalah 3,6 %. Tetapi dalam APBN tahun 2005 dan tahun 2006 tidak dicantumkan dalam neraca APBN.

2. Belanja Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2001, dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari segi

cakupan tugas dan wewenang yang didaerahkan, maupun dari segi besarnya dana yang dialokasikan ke daerah. Sebelum tahun 2001, dana APBN yang dialokasikan ke daerah hanya berupa subsidi daerah otonom (SDO) atau dana rutin daerah (DRD), dan anggaran pembangunan daerah yang dibiayai dengan program Inpres dan juga dana bagi hasil PBB dan BPHTB. Selanjutnya pada tahun 2001 dengan mulai dilaksanakannya pelaksanaan desentralisasi fiskal, dana yang dialokasikan ke daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Selanjutnya, dalam tahun 2002 dan 2003, dana yang dialokasikan ke daerah tidak hanya dalam bentuk dana perimbangan, namun juga dana otonomi khusus dan penyeimbang. Dilihat dari besaran alokasi anggarannya, alokasi anggaran belanja untuk daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam APBN tahun 2004 anggaran belanja untuk daerah mencapai Rp119 triliun (6,0 persen terhadap PDB), dengan perubahan dalam APBN-P tahun 2004 sebesar Rp130 triliun (6,5 persen terhadap PDB), dan dalam APBN tahun 2005 menjadi Rp131,5 triliun, dalam APBN-P I dan APBN-P II tahun 2005 sebesar Rp147,8 triliun dan Rp153,4 triliun. Atau 5,8 persen terhadap PDB.

Sementara itu, dalam APBN tahun 2006, belanja untuk daerah ditetapkan Rp220 triliun (7,0 persen terhadap PDB). Sejalan dengan peningkatan anggaran belanja untuk daerah, anggaran dana perimbangan maupun anggaran dana otonomi khusus dan penyeimbang juga cenderung meningkat. Dalam APBN tahun 2004 anggar dana perimbangan mencapai Rp112,1 triliun (5,6 persen terhadap PDB), dengan perubahan dalam APBN-P tahun 2004 sebesar Rp123,1 triliun (6,2 persen terhadap PDB), dan dalam APBN tahun 2005 menjadi Rp124,3 triliun, pada APBN-PI dan APBN-II adalah Rp140 triliun dan Rp146 triliun dengan rasio terhadap PDB 5,5 persen, atau 0,7 persen lebih rendah dari APBN-P tahun 2004.

Sementara itu, dalam APBN tahun 2006, dana perimbangan ditetapkan Rp216,5 triliun (6,9 persen terhadap PDB), atau meningkat sebesar 1,4 persen dari anggaran dana perimbangan dalam APBN-P II tahun 2005. Anggaran dana perimbangan tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Penerimaan negara yang dibagi hasilkan ke daerah melalui APBN meliputi DBH perpajakan dan DBH sumber daya alam (SDA). DBH perpajakan yang berasal dari pajak penghasilan,

khususnya PPh Pasal 21 dan 25 atau 29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Sementara itu, DBH SDA meliputi DBH SDA minyak bumi, SDA gas alam, SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan PP Nomor 104 Tahun 2000, alokasi untuk daerah dari bagi hasil minyak bumi dan gas alam masing-masing ditetapkan 15 persen dan 30 persen setelah dikurangi pajak.

Namun, khusus untuk dua daerah, yaitu Provinsi Papua dan Aceh, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, besarnya alokasi dana bagi hasil dari penerimaan minyak bumi dan gas alam untuk kedua provinsi tersebut masing-masing ditetapkan sebesar 70 persen setelah dikurangi pajak.

Pada APBN-P tahun 2004, anggaran dana bagi hasil ditetapkan sebesar Rp26,9 triliun, Sementara itu, dalam APBN tahun 2005, dana bagi hasil ditetapkan sebesar Rp31,2 triliun atau meningkat Rp4,3 triliun dibandingkan dengan anggaran dana bagi hasil dalam APBN-P tahun 2004. Sedangkan dalam APBN tahun 2006 dianggarkan Rp59,3 triliun. Untuk DAU, dalam APBN tahun 2004, jumlah dana alokasi umum mencapai Rp82,1 triliun.

Sementara itu, dalam APBN tahun 2005, dana alokasi umum ditetapkan sebesar Rp87,0 triliun, dan pada APBN tahun 2006 meningkat menjadi Rp145 triliun. Dana alokasi khusus (DAK) disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat khusus. Penyaluran DAU untuk masing-masing daerah setiap bulannya ditetapkan sebesar seperduabelas dari pagu yang tercantum dalam alokasi DAU sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, dana penyeimbang terdiri dari dana penyeimbang murni, dan dana penyeimbang kebijakan (*ad-hoc*). Dana penyeimbang murni disediakan untuk menutup kekurangan DAU yang diterima oleh masing-masing daerah agar dana yang diterimanya (DAU ditambah dana penyeimbang) minimal sama dengan DAU plus dana penyeimbang tahun sebelumnya. Sedangkan dana penyeimbang kebijakan (*ad-hoc*) diberikan kepada

daerah provinsi/ kabupaten/kota untuk membantu keuangan daerah dalam rangka perbaikan penghasilan pegawai negeri sipil sebesar 10 persen dan kenaikan tunjangan fungsional kependidikan sebesar 50 persen.

C. Keseimbangan Umum dan Defisit APBN

Dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dan penyehatan APBN, pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi secara bertahap defisit anggaran. Hal itu dilakukan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi pada kenyataannya defisit APBN cenderung berfluktuasi. Dalam APBN tahun 2004 defisit sebesar Rp24,4 triliun, dalam APBN tahun 2005 defisit turun menjadi Rp17 triliun, tetapi naik lagi dalam APBN-P II 2005 menjadi Rp 24 triliun, dan turun lagi dalam APBN tahun 2006 yang dianggarkan sebesar Rp22 triliun.

Padahal kalau kita lihat dalam tahun 2000 sampai tahun 2005, rasio defisit APBN terhadap PDB turun cukup signifikan dari 2,8 persen terhadap PDB dalam tahun 2001 menjadi 1,7 persen terhadap PDB dalam tahun 2002, dan tahun 2003 sekitar 1,8 persen. Pada APBN tahun 2004 rasionya menjadi 1,3 persen. Sedangkan pada APBN-P II tahun 2005 turun lagi sebesar 0,9 persen, tetapi sayang pada APBN tahun 2006 rasionya naik lagi menjadi 1,2 persen.

D. Pembiayaan Defisit Anggaran

Pembiayaan defisit anggaran selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2004-2006 diarahkan untuk Lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri. Namun, dalam pelaksanaannya hal tersebut belum sepenuhnya dapat tercapai. Sementara itu, pembiayaan deficit anggaran yang bersumber dari luar negeri terus diupayakan untuk dikurangi.

Hal ini tercermin dari perkembangan rasio pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari luar negeri (neto) terhadap PDB mulai dari 1,2 persen terhadap PDB pada APBN-P tahun 2004, dan terus berkurang menjadi 0,9 persen terhadap PDB pada tahun 2005. Sementara itu, dalam APBN tahun 2006 pembiayaan luar negeri neto ditargetkan sebesar negatif 0,5 persen terhadap PDB. Dalam tahun 2004, pembiayaan defisit

anggaran yang dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri mencapai Rp40,5 triliun atau 2,0 persen terhadap PDB.

Jumlah tersebut berasal dari perbankan dalam negeri sebesar Rp19,1 triliun (1,0 persen terhadap PDB), dan dari non perbankan sebesar Rp21,3 triliun (1,1 persen terhadap PDB). Sementara itu, pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari luar negeri (neto) mencapai Rp16,1 triliun atau 0,8 persen terhadap PDB.

Sementara itu, dalam tahun 2005, anggaran pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari dalam negeri mencapai Rp37,5 triliun atau 1,7 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut berasal dari sektor perbankan dalam negeri sebesar Rp9,0 triliun selain itu pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari luar negeri (neto) mencapai negatif Rp20,1 triliun atau negatif 0,9 persen terhadap PDB.

BAB IV

Analisis APBN-P 2006

Perubahan asumsi pada APBNP 2006 menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pada pos-pos pendapatan negara ataupun belanja negara. Sebagai dasar perhitungan APBNP 2006, pemerintah menggunakan asumsi PDB Nominal sebesar Rp 3.122 triliun (asumsi APBN 2006 Rp 3.040,8 triliun). Sementara pertumbuhan ekonomi 5,9 persen (sebelumnya 6,2 persen), dan kurs Rp 9.300 (sebelumnya Rp 9.900/dolar AS).

Adapun asumsi tingkat inflasi tidak berubah, masih sebesar 8,0 persen, SBI tiga bulan 12 persen (dari sebelumnya 9,5 persen), Sementara harga minyak dipatok 62 dolar AS/barel dari sebelumnya 57 dolar AS per barel , dan produksi minyak satu juta barel/hari (1,05 juta).

A. Pendapan Negara dan Hibah

Target penerimaan pajak pemerintah dalam APBNP 2006 baik dari PPN, PBB, BPHTB, Cukai ataupun pajak lainnya ditargetkan naik sebesar Rp 7.1 triliun menjadi Rp 423.5 triliun. Meningkatnya target penerimaan pajak justru diikuti dengan memberikan fasilitas keringanan pajak impor pada pengusaha, yang menurunkan target penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp 3.2 triliun menjadi Rp 13.4 triliun.

Penerimaan Negara pada pos laba BUMN mengalami penurunan dari 23.278,0 triliun menjadi 21.687,7 triliun. Penurunan laba BUMN sebesar 1.590,3 miliar tersebut dikarenakan dananya dicadangkan untuk investasi perusahaan pada tahun 2007.

Peningkatan penerimaan dari pos Hibah pun mengalami peningkatan sebesar 0,31 triliun, dari 3.631,6 triliun menjadi 3.941.6 triliun. Namun rasio terhadap PDB berkurang dari 0,3% menjadi 0,1%.

B. Belanja Negara

Untuk anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester II 2006 diperkirakan mencapai Rp328,9 trilyun atau lebih tinggi 76,9 persen dari APBN awal sebesar Rp427,6 trilyun. tingginya perkiraan belanja pemerintah pusat itu terjadi akibat tingginya alokasi

untuk menampung berbagai kebutuhan mendesak yang selama satu semester, termasuk kenaikan anggaran pendidikan, kenaikan anggaran untuk bencana alam, kenaikan untuk subsidi PLN dalam rangka tidak naiknya TDL, tambahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, dan Jawa Tengah, serta Pangandaran dan sekitarnya. .

Secara keseluruhan belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp470, 2 triliun atau naik 10 persen dibandingkan target dalam APBN. Untuk berbagai kebutuhan menangani pemulihan dan penanganan akibat bencana, pemerintah menaikkan belanja Negara untuk bantuan social dari 36,93 triliun menjadi 37,23 triliun rupiah.

Untuk belanja pemerintah daerah dalam semester II 2006, diperkirakan mencapai Rp 113,8 triliun atau 51,7 persen dari alokasi semula. Secara keseluruhan, alokasi belanja daerah dalam tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp219,4 triliun. Jumlah ini berartilebih rendah Rp689,2 milyar dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar Rp220,1 triliun.

C. Keseimbangan Umum dan Defisit Anggaran

Dalam APBN-P 2006, selain mengubah beberapa asumsi, pemerintah secara jelas mengemukakan bahwa anggaran pendapatan dianggarkan membengkak dari Rp 625,4 triliun menjadi Rp 651,9 triliun, atau naik Rp 25,7 triliun. Sedangkan anggaran belanja dianggarkan mengembung Dari Rp 647,6 triliun menjadi Rp 689,5 triliun, atau naik Rp 41,9 triliun. Akibatnya, defisit belanja negara yang semula dianggarkan sebesar Rp 22,4 triliun, atau setara dengan 0,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB), otomatis membengkak menjadi Rp 37,6 triliun, setara dengan 1,2 persen PDB.

pembengkakan defisit APBN 2006 terjadi antara lain karena adanya pembatalan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang menyebabkan kenaikan subsidi listrik, adanya alokasi untuk penanganan Jogja dan Jateng paska gempa serta tsunami di pantai selatan Jawa, alokasi penjaminan resiko infrastruktur, dan peningkatan anggaran pendidikan.

D. Pembiayaan

Defisit belanja negara sebesar Rp 37,6 triliun pada APBNP 2005 akan dibiayai dengan mencairkan saldo dana rekening pemerintah sebesar Rp 14,5 triliun, privatisasi BUMN Rp 3 triliun, penjualan aset Rp 2,4 triliun, penerbitan surat utang negara netto Rp

35,8 triliun (termasuk penerbitan Obligasi ritel Indonesia-ORI- yang pada saat ini sudah mencapai 2 triliun lebih), dikurangi penyertaan modal negara Rp 3,3 triliun, pencairan utang luar negeri Rp 39,9 triliun, serta dipotong dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 54,7 triliun.

Artinya, secara ringkas, untuk membiayai defisit belanja negara sebesar 1,2 persen PDB tadi, pemerintah bermaksud menggali dana dari sumber dalam negeri sebesar Rp 52,4 triliun, dan dari luar negeri sebesar minus Rp 14,8 triliun. Bahwa sumber pembiayaan luar negeri justru berperan sebagai pengurang terhadap pembiayaan defisit, tentu cukup membingungkan bagi sebagian orang. Namun, penjelasannya sangat sederhana. Untuk membiayai defisit, pemerintah mencairkan utang luar negeri baru sebesar Rp 39,9 triliun. Tetapi, pada saat yang sama, pemerintah membaaer cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo sebesar Rp 54,7 triliun

BAB V

PENUTUP

Perkembangan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah dalam tiga tahun terakhir secara nominal mengalami peningkatan. Hal itu tidak terlepas dari berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, diantaranya adalah lebih mengintensifkan dan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, karena harus diakui selama ini di sektor perpajakan masih sering terjadi kecurangan-kecurangan terutama yang dilakukan oleh sektor industri, seperti penggelapan pajak, pembobolan restitusi pajak, dan lain-lain.

Sejak tahun 2002, setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, banyak pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga dalam APBN timbul item- item baru seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil, dan dana perimbangan yang semuanya diatur oleh undang-undang ataupun oleh peraturan pemerintah. Sesuai dengan semangat desentralisasi di bidang fiskal, dari APBN tahun 2003 sampai APBN tahun 2006, nilai nominal dana-dana pengeluaran pemerintah yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Besaran-besaran angka dalam APBN tidak akan terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter secara keseluruhan. Selain itu juga akan dipengaruhi oleh perkembangan dan kondisi indikator-indikator makroekonomi yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia, dan tingkat produksi minyak Indonesia.

Meskipun APBN ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun, tetapi dalam perjalanannya kadang-kadang besaran angka dalam APBN sudah tidak sesuai dengan kondisi riil, juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan makroekonomi yang terjadi dan juga dengan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan setor riil. Maka dalam pertengahan tahun anggaran biasanya pemerintah melakukan perubahan besaran anggaran, hasil perubahan itu disebut APBN perubahan atau APBN-P.

Dalam semester dua tahun anggaran 2004 dilakukan perubahan anggaran yang disebut APBN-P 2004, sedangkan tahun anggaran 2005, terjadi dua kali perubahan anggaran yaitu APBN-P I dan APBN-P II 2005. Hal ini terjadi karena berbagai hal seperti adanya peralihan kekuasaan dari kabinet gotong royong ke kabinet Indonesia bersatu. Selain itu adanya berbagai bencana alam seperti terjadinya bencana tsunami di Aceh dan Nias pada penghujung tahun 2004, akibatnya pemerintah harus menanggung biaya rekonstruksi yang sangat besar, yang menyedot dana dari APBN 2005. Sedangkan pada semester dua tahun anggar 2006 juga dilakukan perubahan APBN 2006 yang disebut APBN-P 2006 untuk menyesuaikan dengan keadaan makroekonomi yang terjadi dan dengan kebijakan yang diambil pemerintah.

SUMBER

1. Badan Pusat Statistik
2. Koran Tempo
3. Harian Republika hari Rabu 5 Juli 2006
4. Harian *Media Indonesia* - 19 Juli 2006
5. www.depkeu.go.id
6. www.wikipedia.or